

KEKUASAAN, KEKERASAN DAN MOBILITAS JAWARA

Abstrak:

Dalam hirarki sosial, mereka yang memiliki kekuasaan akan menempati posisi paling tinggi pada puncak struktur sosial, seperti Sultan dan para kerabatnya sebagai bangsawan kesultanan Banten. Di bawah mereka adalah golongan elite birokrasi, termasuk pemimpin agama seperti kadi, personil mesjid, dan petugas perawat tempat-tempat suci, golongan Mardika/kaum, golongan utangan hingga munculnya kelompok yang dikenal dengan sebutan jawara.

Proses terbentuknya kedudukan, peran dan jaringan sosial jawara di Banten dimulai sejak periode awal berdirinya kesultanan Banten bahkan hingga masa setelah kolonialisme berakhir. Kemampuan dan keunggulannya telah membuat menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dikagumi bahkan muncul menjadi tokoh yang kharismatis dan herois, karena kerap muncul sebagai pemimpin sebuah pergerakan sosial.

Tulisan ini, berusaha menjelaskan beberapa rumusan yang berkaitan dengan gambaran dinamika struktur sosial masyarakat Banten dan sejauhmana perubahan struktur itu mempengaruhi munculnya jawara sebagai lapisan elite sosial. Hal menarik untuk dikemukakan dalam tulisan ini juga adalah: apakah yang menjadi dimensi utama dan bagaimana strategi jawara dalam mengolah mobilitas sosialnya?

Kata Kunci: Peran, jaringan, dan mobilitas sosial.

Pendahuluan

Jawara Banten menjadi obyek yang cukup menarik untuk diteliti. Telah banyak hasil penelitian yang menjelaskan tentang sejarah keberadaannya sesuai dengan minat para peneliti. Dari sudut sosiologis, hal yang menarik dari keberadaan jawara adalah studi yang berhubungan dengan perkembangan mobilitas jawara. Mobilitas sosial, adalah studi yang berkaitan dengan perpindahan kedudukan sosial baik individu maupun kelompok dalam sistem sosial, atau naik-turunnya seseorang atau kelompok dalam konteks kekuasaannya, prestise (kehormatan), dan

previlise (ekonomi). Mobilitas juga dapat menjelaskan tentang perubahan naik-turun status sosial seseorang dalam perjalanan hidupnya (intragenerasi) dan perbandingan keadaan seorang anak dari orangtuanya (antargenerasi).

Sebagaimana dijelaskan Kartodirdjo¹, masyarakat Banten telah mengenal sistem sosial yang secara tradisional menempatkan sultan dan para kerabatnya berada di puncak struktur sosialnya. Sebagai lapisan sosial atas, sultan dan kerabatnya memiliki kekuasaan secara turun temurun. Sementara pada lapisan sosial bawah ditempati oleh para petani, pedagang, tukang dan para buruh, atau lapisan sosial yang disebut dengan *jalma leutik*

Sementara, istilah jawara baru dikenal setelah kesultanan Banten dianeksasi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Peralihan sistem kekuasaan dari tradisi kesultanan kepada model birokrasi modern, secara langsung telah mempengaruhi struktur tradisional masyarakat Banten. Pelapisan (stratifikasi) sosial pada masa kolonial Belanda, tidak lagi didasarkan kepada prestise kultural, akan tetapi lebih ditekankan kepada keunggulan ras sosial. Jawara ditempatkan pada lapisan terbawah dari golongan pribumi yang menduduki lapisan bawah dari dua golongan sosial lainnya, yaitu Eropa dan Asia.

Pada masa kolonisasi, selain kiyai, jawara memiliki kharisma istimewa pada masyarakat Banten. Peran sosial mereka begitu kuat terutama di saat sistem kekuasaan pemerintahan Belanda tidak mendapat tempat dan mengakar dalam masyarakat. Di sisi lain masyarakat baru saja kehilangan kendali tradisionalnya yang menjadi tulang punggung dalam proses penyelenggaraan kekuasaan. Kehadiran Jawara, dengan kelebihan ilmu kanuragan dan magisnya serta kemampuan yang cukup tentang ilmu-ilmu keagamaan, bagi masyarakat petani—kalaupun pada saat tertentu kehadiran mereka seringkali mengganggu ketentraman masyarakat—dipandang sebagai *balance of power* untuk merebut hak-hak atas tanah dan pekerjaan mereka yang telah dirampas oleh pemerintahan kolonial.² Karena peran besarnya itu, bahkan ada yang menghormati dan memuja jawara sebagai orang keramat.

Pasca kolonial, jawara melakukan metamorfosis tubuh dalam mempertahankan keberadaannya. Mereka menjelma menjadi kekuatan yang dapat mengakses peran-peran sosial-politik secara lebih leluasa. Persebaran kekuasaan jawara dalam berbagai ruang sosial dan politik itulah yang kemudian mendorong perubahan status sosial jawara menjadi lapisan sosial atas pada masyarakat Banten.

Tulisan ini, berusaha menjelaskan beberapa rumusan yang berkaitan dengan gambaran dinamika struktur sosial masyarakat Banten dan sejauhmana perubahan struktur itu mempengaruhi munculnya jawara sebagai lapisan elite sosial. Hal menarik untuk dikemukakan dalam tulisan ini juga adalah: apakah yang menjadi dimensi utama dan bagaimana strategi jawara dalam mengolah mobilitas sosialnya?

Dinamika struktur sosial masyarakat

Pada masa kesultanan berkuasa, masyarakat banten sudah mengenal adanya hirarki sosial yang secara tradisional mereka sebut dengan istilah *undakan*.³ Masyarakat Banten, seperti halnya masyarakat tradisional lainnya, dapat disebut sebagai masyarakat yang memiliki sistem sosial *bi-modal*, sistem sosial yang menggambarkan pembagian golongan sosial dalam dua kelas; yaitu golongan *priyayi*, terdiri dari kalangan birokrat dan bangsawan, yang merupakan jumlah terkecil masyarakat, dan *jalma leutik*, golongan sosial yang berjumlah paling banyak yang terdiri dari petani, tukang, pedagang, dan buruh.

Dalam hirarki sosialnya, golongan yang memiliki kekuasaan menempati puncak struktur sosial, yang terdiri dari golongan kerabat Sultan sebagai bangsawan kesultanan Banten. Bangsawan kesultanan ini juga terdiri dari bangsawan atas dan bangsawan rendahan. Bangsawan rendahan ini adalah golongan orang-orang dari keturunan pahlawan-pahlawan legendaris yang berjuang untuk pengislaman banten atau orang-orang dari keturunan putri sultan yang kedua. mereka kemudian menggunakan gelar *raden*. Di bawah mereka adalah golongan yang ditempati elite birokrasi kesultanan, termasuk para pemimpin agama yang mendapatkan jabatan-jabatan formal birokrasi dari sultan. Jabatan formal birokrasi kesultanan yang diduduki oleh para pejabat agama tersebut antara lain, *kadi*, semua personil mesjid, dan mereka yang merawat tempat-tempat yang suci. Yang paling terkemuka adalah "Fakih Najmuddin" yang menduduki jabatan ketua pengadilan di Banten. Selanjutnya, ada golongan yang disebut *Mardika* atau *kaum*, sebutan bagi mereka yang secara sukarela masuk Islam beserta keturunannya. Sebagai golongan terbawah dari bangsawan adalah golongan *utangan*, orang-orang yang ditaklukan dan kemudian masuk Islam. Mereka mempunyai tugas khusus sebagai prajurit yang memerangi bajak laut.

Sultan menempati puncak hirarkinya. Secara turun temurun ia adalah kepala aristokrasi yang berkuasa. Karena sultan dan kerabatnya menduduki tempat paling atas, maka mereka berhak atas tanah⁴ *Pusaka Kawargaan* atau *kanayakan*, dan dari itu pula mereka berhak atas kerja

bakti dan upeti dari rakyat. Keturunan sultan sampai generasi ketiga disebut warga, dan keturunan yang lebih jauh lagi disebut nayaka. Mereka memakai gelar yang berbeda-beda menurut hirarki kedudukannya. Golongan pertama memakai gelar Pangeran, Ratu, Tubagus. Sedangkan seorang nayaka biasanya hanya diperkenankan memakai gelar Tubagus dan Ratu. Ada juga golongan masyarakat yang tidak termasuk keluarga sultan tetapi memakai gelar Mas, Entol, Apun, Ujang, dan raden untuk laki-laki, dan Ayu untuk wanita. Gelar Bagus dan Agus yang tidak menunjukkan kebangsawanan, dipakai oleh orang-orang terhormat yang mempunyai prestise di kalangan masyarakat.

Pada jajaran elite birokrasi sebagai pembantu raja patih menduduki tempat paling atas. Ia adalah wazir besar dan di bawahnya dijabat tumenggung. Selain itu juga ada syahbandar yang bertugas untuk memfasilitasi kepentingan sultan dengan pedagang asing. Di bawahnya secara turut menurut ditempati oleh demang yang mengepalai distrik, mantri sebagai pelayan sultan, dan lurah.

Ilustrasi struktur sosial pada masa kesultanan Banten sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa stratifikasi sosial ditentukan status sosial (*prestise*) seseorang atau kelompok. Kedudukan ini mempengaruhi penguasaan terhadap sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi yang meningkat status privilese golongan bangsawan. Akibatnya, skala hirarki birokrasi di Banten sangat terbatas yang mendorong penggolongan status menurut garis keturunan bangsawan lebih mendapat perhatian dibanding kedudukan sosial menurut garis struktur birokrasi.⁵

Logika kekuasaan yang dibangun pada masa kesultanan merupakan tipe birokrasi yang terpusat. Di dalam suatu pemerintahan terdapat formasi yang merupakan sistem politik dengan birokrasi sebagai alat pemerintah pusat untuk mengontrol pemerintahan di bawahnya (daerah) melalui aturan-aturan yang dikeluarkan. Karena itu ada tuntutan loyalitas pemerintahan di daerah-daerah kepada pemerintahan pusat. Penguasa sebagai birokrat menjalankan otoritasnya agar diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, hubungan pemerintahan pusat dan daerah merupakan kekuatan utama sistem pemerintahan.⁶ Menurunnya kekuasaan di pusat akan mengganggu stabilitas pemerintahan di daerah, dan tidak jarang muncul tuntutan daerah untuk melepaskan ketergantungan birokratis dengan pusat lebih-lebih jika sebuah daerah sudah memiliki kekuatan sumber daya.

Dalam konteks tradisional baik penguasa pusat maupun di daerah seringkali didasarkan kepada pilihan-pilihan yang bersifat kharismatik,

sehingga relatif memiliki kemampuan bertahan sebagai penguasa yang *establish* dalam jangka panjang dan berkedudukan sebagai aristokrat yang berwibawa. Karena otoritas tradisionalnya itu mereka diakui hak-haknya secara turun-temurun. Penguasa lokal menjalin hubungan emosional dengan rakyatnya melebihi hubungan birokratis atasan bawahan dalam konteks kekuasaan. Hubungan ini yang dikenal dengan istilah jawa *manunggaling kawula lan gusti*, artinya bersatu, manunggal antara hamba dan raja. Raja dan rakyat merupakan dua komponen yang *simbiotik*, saling menghidupi karena keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri. Keduanya mempunyai tugas dan kewajiban, di satu pihak raja sebagai pelindung rakyat dan rakyat wajib memberi pelayanan. Antara loyalitas dan servis dalam kaitan raja dan rakyat tidak dapat dipisahkan.⁷ Kekuasaan pusat cenderung memaksakan kekuasaannya kepada daerah dengan memperkuat ikatan-ikatan feodalnya. Orietansi feodal dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan atasan sehingga bawahan menjadi tergantung kedudukannya.

Struktur birokrasi tradisional kesultanan Banten, sultanlah yang menduduki jabatan dan otoritas tertinggi. Di bawahnya adalah sekelompok *pangeran* yang merupakan anggota keluarga sultan dan para *bangsawan* istana. Mereka memegang jabatan-jabatan kemiliteran, perdagangan, pajak, keagamaan dan lain-lain. Puncak struktur birokrasi dikepalai oleh birokrasi *patih* (wazir besar), sedangkan fungsi pengadilan keagamaan dipegang oleh *Fakih Najmuddin* yang dibantu oleh dua *kliwon*. Di jabatan itu ada bagian yang mengurus administrasi dan pengawasan atas penanaman lada, produksi, dan perdagangannya yang disebut *punggawa*. Sementara *syahbandar* ditugasi mengawasi perdagangan luar negeri di pelabuhan. Seajar dengan jabatan syahbandar adalah para kepala daerah, *bumi* Lebak, *pangeran* Caringin, *bupati* Pontang dan Jasingan.⁸ Tingkat hirarki yang paling bawah diduduki oleh yang memangku jabatan *ngabeuy* dan lurah yang ditugasi mengawasi sejumlah rumah tangga. Tugas utama mereka adalah memungut pajak dan upeti serta memelihara ketertiban umum.

Secara umum penempatan pada sebagian terbesar pejabat yang berada di bawah kendali kesultanan Banten tidak didasarkan kepada keahlian dalam jabatan birokrasi, tetapi lebih didasarkan kepada ikatan-ikatan kekerabatan dengan sultan atau elite birokrasi. Kedekatan karena keturunan sebuah keuntungan dan memudahkan orang untuk memperoleh jabatan-jabatan di lingkungan kesultanan.

Masuknya kolonialisme, khususnya setelah Daendels menghancurkan kesultanan pada tahun 1802, Banten mengalami perubahan sistem sosial yang menghilangkan sistem sosial tradisionalnya. Struktur-struktur politik tradisional menjadi struktur-struktur politik modern Barat. Proses perubahan ini melibatkan suatu pergeseran pola-pola institusional, dari pola-pola kekuasaan yang tradisional ke arah penerimaan dan pelebagaan seperangkat norma dan sasaran-sasaran politik yang diilhami Barat.

Kolonial Belanda secara berangsur-angsur memutuskan struktur hubungan-hubungan politik tradisional. Transformasi pola kekuasaan tradisional ke pola kekuasaan yang *rasional-legal* dilaksanakan selangkah demi selangkah. pada masa-masa awal kekuasaannya, Belanda masih mempertahankan sultan dan perangkat politiknya dengan ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Sultan yang diangkat hanya sekedar untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintahan Belanda, dan ia walau diperkenankan untuk memakai gelar sultan, peranannya tidak lebih sebagai boneka kepentingan kolonial. Seluruh wilayah banten dimasukan ke dalam kekuasaan wilayah pemerintahan kolonial yang dipersempit.

Pada sisi lain, pemerintahan kolonial juga memperhatikan kemampuan, jasa atas loyalitas yang diberikan terhadap pemerintahan kolonial, dan prestasi. Dualisme itu berarti bahwa di satu pihak kebijaksanaan kolonial masih memperhitungkan faktor-faktor khusus seperti latar belakang keluarga, sedangkan di pihak lain juga menekankan aspek-aspek yang berlaku umum seperti persyaratan teknis dalam birokrasi rasional. Dalam konteks itu, pemerintahan kolonial Belanda menggunakan sistem birokrasi yang disebut Parsons sebagai "*cybernetic hierarchy*," model birokrasi yang memadukan sumber-sumber nilai tradisional dengan konsep birokrasi yang mendorong kearah perubahan (modern). Dalam pandangan Parsons, sebuah perubahan tidak bisa secara langsung "meninggalkan" nilai-nilai lama yang sebelumnya berkembang. Nilai-nilai lama akan senantiasa memiliki kepentingan fungsional bagi sebuah perubahan sosial. Oleh karena itu, perubahan dipandang sebagai sebuah proses yang bersifat evolusi.

Mengikuti para pendahulunya Durkheim dan Spencer, Parson menjelaskan bahwa proses evolusi adalah upaya mengembangkan perbedaan unit-unit sistem ke dalam bentuk-bentuk yang secara fungsional saling bergantung, menetapkan mekanisme dan prinsip-prinsip yang terintegrasi dalam istem yang berbeda, dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap sistem yang berbeda dalam lingkungan.¹⁰

Kasus pengangkatan Abul Mafakhir Mohammad Aliyuddin misalnya, menjadi contoh dari kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Banten mempunyai sejarah selain sebagai sebuah kerajaan pelabuhan juga pemerintahan birokratis kesultanan yang cukup lama. Di bawah pemerintahan kesultanan—walau terkadang masyarakat tidak jarang disajikan konflik-konflik politik kesultanan—Banten telah menjadi wilayah yang kuat, maju, dan subur. Pengalaman itu yang kemudian melahirkan sikap fanatisme yang tinggi dari masyarakat terhadap kelembagaan sultan. Oleh karena itu, dalam upaya menjaga keseimbangan kekuasaannya, pemerintahan kolonial Belanda membolehkan penggunaan gelar Sultan bagi Abul Mafakhir Mohammad Aliyuddin yang mereka angkat untuk menggantikan Sultan Abu Natsir Mohammad Ishak Zainul Mustakin, yang sebelumnya dibuang pemerintahan kolonial Belanda ke Amboina.¹¹

Posisi sultan dan bupati pada pemerintahan kolonial hanya dijadikan pegawai pemerintahan yang menerima gaji di bawah pengawasan *prefek* (residen), sistem pergantian sultan dan bupati secara turun temurun digantikan dengan sistem penunjukan dan kekuasaannya berangsur-angsur dikurangi.¹² Ia menjalankan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Semua urusan pemerintahan, baik pusat maupun daerah diatur dengan instruksi dari gubernur jenderal.

Pemerintahan kolonial Belanda juga mengangkat rakyat biasa dan orang-orang “asing” dalam struktur pemerintahannya. Mereka mengembangkan suatu perangkat kepamongprajaan yang baru dan kekuasaan politik didistribusikan di antara mereka. Mereka ditugaskan untuk mengawasi kegiatan para bupati dan bawahan mereka.

Penetrasi personil asing dari birokrasi kolonial ke dalam struktur administrasinya di daerah menyebabkan terjadinya pergeseran focus kekuasaan dan tanggungjawab dari kekuasaan sah para bupati berdasarkan tradisi kepada kekuasaan pemerintahan Belanda. Konsekuensinya kedudukan bupati semakin menurun kewibawaannya karena mereka hanya menjadi alat kepentingan kolonial.¹³

Dalam hirarki pejabat-pejabat yang disusun oleh Belanda, residen merupakan bawahan yang kedudukannya lebih tinggi dari anak buah rendahan yang ditempati oleh orang-orang pribumi. Administrasi keresidenan dipercayakan kepada *residen* dengan kekuasaannya melebihi kekuasaan yang pernah dimiliki oleh kepala-kepala daerah pribumi dalam organisasi tradisional. Residen bertanggungjawab atas ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban daerahnya, dan mengawasi fungsi dan kegiatan semua pejabat setempat, baik Eropa maupun pribumi.

Hubungan atasan-bawahan diberi warna tradisional dengan menggunakan istilah-istilah kekerabatan,¹⁴ seperti bupati disebut “adik” residen.

Dengan semakin besarnya kekuasaan asing (kolonial Belanda) di Banten, maka struktur sosial pun bergeser. Struktur sosial masyarakat Banten yang didasarkan kepada status sosial tradisional kemudian berubah menjadi pelapisan yang didasarkan kepada ras sosial. Berdasarkan kriteria ini, masyarakat terbagi ke dalam lapisan sosial dengan puncak hiraknya ditempati oleh bangsa Eropa. Di tengah-tengah lapisan sosial masyarakat Cina/Arab, dan golongan paling bawah ditempati oleh masyarakat pribumi.

Dalam pelapisan sosial pribumi ada golongan sosial yang menempati lapisan terbawah dalam hirarkinya yaitu jawara, yakni golongan orang-orang yang tidak memiliki tanah dan cenderung membangkang dengan jalan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara konvensional dipandang anti-sosial dan jahat seperti merampok, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hidup di luar hukum.¹⁵

Selain meruntuhkan struktur sosial tradisional, pemerintahan kolonial juga telah mempengaruhi proses mobilitas sosial secara terbuka. Pada jabatan birokrasi, selain banyak orang “asing” dari luar daerah, pemerintahan kolonial juga mengangkat orang-orang dari rakyat biasa yang memiliki kesetiaan.¹⁶

Di antara pejabat dari kalangan masyarakat biasa adalah Condronegoro menjadi Bupati Serang, dan sebelumnya menjabat sebagai Bupati Pandeglang. Ia berasal dari rakyat biasa yang mengawini wanita keturunan sultan, yaitu Ratu Siti Aminah.¹⁷ Condronegoro tidak hanya cakap tetapi juga ia memiliki pengaruh yang besar di seluruh keresidenan. Pada tingkat bupati, selain Condronegoro, bupati yang diangkat dari keturunan rakyat biasa adalah Suta Angunangun sebagai Bupati Lebak. Ia seorang yang sangat taat terhadap agamanya dan tidak jarang menjadi khotib dalam sholat jum’at.¹⁸

Perubahan struktur pemerintahan di tingkat bawah juga memperlihatkan adanya keterbukaan bagi rakyat biasa untuk memegang jabatan pemerintahan. Yang menarik, atas usul yang diajukan oleh Patih Lebak Ngabehi Bahupringga, Sahab diangkat menjadi demang Gunung Kencana-Lebak. Sahab lahir dari golongan strata sosial rendah dan pernah menjadi pemimpin gerombolan.

Sementara pejabat-pejabat “orang asing” biasanya didatangkan dari Bogor dan Priangan. Di antara mereka adalah R.T.A. Wiriadijaya sebagai Bupati Caringin dan R.T. Karta Natanegara Bupati Lebak,

keduanya berasal dari Bogor. Sementara R.T. Suria Nataningrat berasal dari priangan. Ada juga seorang Patih Anyer yang didatangkan dari luar Banten, seperti Raden Penna, yang digambarkan sebagai seorang yang berpendidikan Barat dengan ucapan dan perilakunya lebih mencerminkan sebagai seorang Barat dibanding Indonesia.

Dalih yang seringkali menjadi alasan atas pengangkatan "orang-orang asing" menjadi pejabat di Banten, karena pemerintah kolonial menganggap tidak ada calon-calon setempat yang dipandang cocok untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang lowong. Tentu saja kebijakan ini melahirkan kecemburuan dan kebencian yang semakin mendalam baik bagi para pejabat pribumi maupun masyarakat Banten secara umum. Oleh karena mereka ditempatkan dalam posisi yang asing dan tanpa ikatan-ikatan tradisional dengan penduduk setempat, mereka terpaksa bertumpu pada kekuasaan kolonial.

Untuk dapat diterima di lingkungan barunya, para pejabat dari luar daerah itu, mereka berusaha melakukan adaptasi terhadap lingkungan masyarakat Banten melalui perkawinan dengan wanita-wanita bangsawan Banten atau mencoba memimpin urusan-urusan keagamaan. Cara-cara tersebut nampaknya cukup efektif untuk menciptakan ikatan dengan penduduk dan berhasil melahirkan keluarga inti di Banten.¹⁹

Dimensi Kekuasaan dan Mobilitas Jawara

Kajian mobilitas sosial berhubungan dengan proses perubahan stratifikasi sosial sebagai obyek studinya, yang menekankan kepada konsep-konsep kekuasaan, privilese, dan prestise. Dalam membahas ketiga konsep, kecenderungan madzhab struktural-fungsional sebagaimana dijelaskan Jeffries dan Ransford,²⁰ lebih memberikan perhatian kepada dimensi prestise sebagai konsep utama stratifikasi, sementara privilese ditempatkan menjadi dimensi kedua, dan seringkali mengabaikan dimensi kekuasaan. Dalam pandangan madzhab struktural-fungsionalis, stratifikasi adalah keharusan fungsional. Mereka juga memandang sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur, dan menunjukkan bahwa stratifikasi tidak mengacu kepada individu di dalam sistem stratifikasi, tetapi lebih kepada sistem posisi atau kedudukan. Sebagai tokoh utama yang mewakili madzhab struktural-fungsional, Talcott Parsons,²¹ menjelaskan bahwa timbulnya stratifikasi adalah sebagai aspek penting dari evolusi akibat meningkatnya kapasitas adaptif dalam kehidupan sosial. Bagi Parsons, dorongan evolusioner lah yang membuat banyak bentuk-bentuk kemajuan sosial. Dengan adanya stratifikasi, maka individu akan melakukan peran kepemimpinan dan akan mendapat

ganjaran berupa hak istimewa dan prestise. Stratifikasi menjadi alat yang diperlukan untuk memusatkan aktifitasnya dengan tujuan memecahkan masalah dan menghadapi tantangan. Makin besar masalah dan tantangan yang dihadapi, makin besar kebutuhan akan stratifikasi.

Sementara mengenai hubungan antara tiga dimensi stratifikasi sosial dari sudut pandang teori konflik, sebagaimana dijelaskan C.W. Mills, tetap bersifat konsisten. Tetapi yang paling menonjol dari ketiganya adalah dimensi kekuasaan. Dalam pandangan Mills,²² kekuasaan seringkali dijadikan sebagai alat untuk meraih pekerjaan dan posisi-posisi penting pada ruang-ruang politik, agama, dan ekonomi. Kekuasaan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemikiran orang lain di dalam upaya meraih tujuan kekuasaan.

Mills memberikan ilustrasi bagaimana dominasi militer dalam kehidupan sosial sebagai akibat kekuasaan Amerika Serikat dalam keterlibatannya dalam Perang Dunia II. Perang dingin dalam bidang ideologi di tahun 1950-an merupakan salah satu contoh yang ikut mempertahankan peranan militer dalam kehidupan politik. Akibat dominasi itu mobilitas horizontal yang terjadi kemudian hanya terjadi di lapisan sosial yang sama dan lingkaran elite saja sehingga mereka benar-benar merupakan kekuatan yang menonjol yang jauh terpisah dari lapisan sosial bawah.

Teori yang menekankan kepada pentingnya kekuasaan dalam stratifikasi sosial, juga dikemukakan oleh Gerhard Lenski,²³ tetapi lebih berorientasi materialistik dengan landasan teori konflik. Lenski memperkenalkan dua teori yang disebutnya dengan hukum-hukum distribusi, yaitu teori surplus dan teori kekuasaan.

Lenski menjelaskan bahwa sebagian besar persebaran privilese dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh persebaran kekuasaan. Dengan kata lain, jika saja pola persebaran kekuasaan dalam suatu masyarakat sudah dapat ditentukan, secara otomatis berarti pola persebaran privilese juga turut ditentukan. Demikian pula, jika sebab-sebab terjadinya suatu persebaran tertentu dalam dimensi kekuasaan, berarti pula sebab-sebab persebaran privilese telah ditemukan.

Lenski tidak memperlihatkan kemungkinan pengaruh langsung dari dimensi privilese terhadap dimensi kekuasaan, kecuali melewati dimensi prestise secara tidak langsung. Sedangkan antara altruisme dengan dimensi privilese terdapat hubungan satu arah. Hubungan itu memperlihatkan pengaruh yang bersifat sekunder, karena kemungkinan terjadinya hubungan itu dalam kehidupan sosial sehari-hari sangatlah kecil. Adanya hubungan itu nampaknya merupakan bentuk penjelasan

asumsi Lenski tentang individu dalam konteks masyarakat, dimana orientasi kepentingan individu lebih diutamakan melebihi kepentingan yang bersifat kemasyarakatan. Adanya kemungkinan individu saling bekerjasama merupakan pengakuan Lenski terhadap manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan hidup dalam sistem sosial yang tidak dapat dihindari. Karena itu, Lenski tetap memberikan kemungkinan pada munculnya *altruisme* walaupun sangat sulit dilaksanakan.

Berdasarkan pada tafsir tersebut, dengan demikian dimensi prestise sangat dipengaruhi oleh dimensi kekuasaan dan privilese. Konsep Lenski nampaknya merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis proses mobilitas jawara. Dengan kelebihan mengolah fisik dan ilmu-ilmu kanuragan yang dimiliki, pasca kolonialisasi, jawara telah melakukan *metamorfosis tubuh* yang memberikan pengaruh dalam meningkatkan peran-peran sosial politiknya. Jawara tidak saja sebagai tokoh pemimpin tradisional yang diakui di masyarakat, seperti *centeng*, *kepala buruh*, *jaro*, *camat* atau *demang*, di saat Banten sedang mengalami transisi kekuasaan, tetapi juga menjadi modal politik bagi kepentingan golkar pada masa orde baru berkuasa. -

Kepemimpinan kultural jawara berhasil menghantarkan golkar sebagai partai politik yang dapat mendulang suara yang signifikan pada hampir setiap penyelenggaraan pemilu di Banten. Pada penyelenggaraan pemilu 1971, sekitar selang satu tahun jawara bergabung, golkar menjadi kontestan pemilu yang paling sukses meraih suara dengan perolehan 66,11 persen. Kesuksesan golkar berlanjut pada pemilu 1977 dengan 55,97 persen suara. 55,60 persen suara diraih pada pemilu 1982. Kemenangan yang paling spektakuler diraih pada penyelenggaraan pemilu 1997, setahun sebelum terjadi reformasi, golkar meraih 68,7 persen suara.²⁴

Jawara, menjadi salah satu tokoh kultural yang otoritas kepemimpinannya cukup berpengaruh di masyarakat Banten pasca peminggiran politik agama yang dilakukan rezim orde baru. Terjadi *Islam-phobia*, dimana Islam dijadikan musuh bersama. Kebencian terhadap Islam dengan nyata-nyata dinyatakan oleh Soeharto selaku presiden di depan para bekas pimpinan partai Katolik menjelang pemilu 1977, bahwa "musuh bersama kita adalah Islam".²⁵ Kehancuran partai politik Islam menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Rezim Soeharto bukan saja membatasi, tapi berupaya menghancurkan politik Islam. Pada tahun 1984 PPP dipaksa untuk menggantikan Islam sebagai ideologi partainya dengan Pancasila. PPP

juga tidak boleh melakukan kampanye dengan menggunakan simbol Ka'bah sebagai lambang partainya. Akibatnya, PPP juga kehilangan identitasnya sebagai partai Islam, dan ini membuat para pendukungnya makin kecewa terhadap orde baru.

Konstruksi politik rezim orde baru, dengan sangat serius telah mempengaruhi keamanan sistem budaya politik lokal. Penerapan sistem peminggiran politik Islam, bagi Banten misalnya, telah mempengaruhi posisi politik kiyai sebagai *entitas* penting golongan Islam. Posisi kiyai beralih menjadi tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat dalam konteks politik lokal, karena ia secara sistematis terpinggirkan dengan kebijakan aliansi Islam politik oleh rezim yang dimanifestasikan di partai Golkar. Posisi kiyai menjadi cenderung berada pada posisi periferi.²⁶ Sementara peran kepemimpinan jawara memperoleh penguatan.

Selain karena diuntungkan dengan sistem politik, jawara memiliki sistem jaringan keanggotaan yang cukup baik, sampai ke tingkat desa. Untuk menjaga soliditas keanggotaan jawara membentuk wadah kejawaraan yang disebut Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI). Organisasi ini mewadahi para pendekar yang memiliki paguron-paguron yang tidak kurang dari 100 paguron tersebar di Banten. Beberapa paguron yang cukup punya nama besar diantaranya Paguron Tjimande yang tergabung dalam TTKDH (Tjimande Tari Kolot Djeruk Hilir), Persilatan Terumbu, Persilatan Bandrong, Jalak Banten. Semua paguron yang disebutkan berkembang di hampir setiap desa dengan jumlah anggota yang cukup besar. TTKDH sejak berdirinya pada tahun 1952 misalnya, telah memiliki jumlah anggota tidak kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) di Banten.

Dengan sistem jaringan yang begitu rapih yang didasarkan kepada hubungan emosional, sangat memudahkan bagi jawara untuk membangun solidaritas anggota dan jaringan-jaringannya. Paling tidak, ada tiga potensi dasar yang secara tradisional dapat memudahkan mereka untuk membangun solidaritas;²⁷

Pertama, kekerabatan. Karena keahlian “kejawaraan” bukan potensi yang dapat diwariskan secara biologis, maka biasanya para orang tua jawara lebih memilih mengajarkan kepada anak-anak atau kerabatnya untuk dapat mewarisi *ilmu* kesaktiannya. Sikap ini dipilih atas ajaran kejawaraan yang menekankan kepada tiga doktrin, yaitu; *leber wawanan* atau berani dan militan, *silih wawangi* atau sikap kekeluargaan, dan terakhir *kukuh kana janji* atau memiliki komitmen terhadap janji. Komitmen terhadap tiga aspek ini, belajar silat bagi mereka dalam rangka pertahanan diri dan keluarganya dari gangguan orang lain. Dalam kenyataannya,

jawara tidak jarang melakukan balas dendam ketika ada salah seorang keluarganya disakiti.

Kedua, hubungan *saguru-saelmu*. Dalam tradisi jawara, hubungan dengan guru adalah sama dengan kedudukan orang tua. Anak buah jawara menyebut pada gurunya dengan panggilan "*abab*"—panggilan abah merupakan kenyataan umum pada masyarakat banten untuk menyebut nama ayahnya—, dengan maksud ingin mendekatkan hubungan guru-murid seperti pada hubungan orang tua dengan anak. Segala sikap-sikapnya tidak boleh melanggar apa yang menjadi ketentuan seorang guru. Maka di kalangan jawara dikenal dengan istilah "*hjazab*", sebagai restu guru bagi muridnya untuk menyebarkan *elmu* kesaktiannya. Oleh karena itu, tingkat pengabdian seorang murid begitu sangat tinggi kepada gurunya. Seorang tidak boleh melanggar perintah dari gurunya, karena kalau ia melanggar dan apalagi gurunya tidak ridlo, maka seorang murid akan "*kawalat*" (mendapat bencana).

Ketiga, pertemanan. Doktrin pertemanan didasarkan kepada falsafah mu'amalah yang tidak memberikan batasan kaku dalam menjalankan pergaulan.²⁸ Oleh karena doktrin ini, jawara membuka jaringan luas melintasi batas-batas kekerabatan dan keanggotaannya.

Ketiga faktor yang mendukung terhadap kuatnya pengaruh kekuasaan jawara tersebut didukung oleh keadaan sumber daya manusia Banten yang secara umum masih rendah dalam tingkat pendidikannya. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten,²⁹ bahwa penduduk tidak tamat SD 33,63%, tamat SD 30,08%, tamat SLTP 14,54%, tamat SLTA 17,68%, tamat DI/DII 0,60%, dan hanya 3,48% tamat DIII/Sarjana. Dengan mengasumsikan bahwa penduduk yang telah menempuh pendidikan DI – Sarjana telah memiliki kesadaran politik, maka hanya 4,08% saja dari jumlah masyarakat Banten yang dapat dikategorikan memiliki kecenderungan budaya politik *partisipan*,³⁰ dimana pemilih memerlukan orientasi input yang terspesialisasi dan suatu perangkat orientasi diri sebagai aktor politik. Sementara, sebagian terbesar cenderung berorientasi *kaula*, yang bersifat pasif terhadap *output* atau kekuasaan dan orientasi yang sangat rendah terhadap obyek *input* dan diri sendiri sebagai aktor politik.³¹

Golkar-jawara menjadi kekuatan yang melakukan simbiosis mutualisme, dimana jawara menyumbang suara untuk kemenangan golkar, dan golkar memberikan keleluasaan akses politik dan ekonomi untuk jawara. Kepemimpinan jawara dengan golkar yang menjadi kendalanya menjadi sebab semakin kuatnya pengaruh kekuasaan jawara dalam pemerintahan. Dominasi kekuasaan jawara semakin menonjol

setelah berhasil menempatkan salah seorang anak tokoh jawara menjadi Wakil Gubernur Banten, yang merupakan kader golkar.

Untuk melihat gambaran bagaimana kuatnya pengaruh kekuasaan jawara di Banten, dapat dilihat dalam proses pemilihan Gubernur Banten pada tahun 2001. Yang menarik dalam proses pemilihan Gubernur Banten yang pertama itu, tidak ada tokoh-tokoh populer, seperti HH atau BM, yang mau dipasangkan dengan At. HH adalah sosok calon yang dipandang memiliki kapabilitas oleh masyarakat untuk memimpin Banten. Ia sosok akademis yang sarat pengalaman di birokrasi. Akhirnya satu-satunya calon yang dapat disandingkan dengan At adalah DM—satu-satunya calon yang bukan berasal dari Banten—yang sama sekali tidak diunggulkan. Perkawinan DM-At dilaksanakan melalui proses yang alot dan penuh tekanan yang diselenggarakan di Puncak Bogor.³²

Di atas kertas pasangan AM dengan MC dapat memenangkan pemilihan, karena mereka diusung oleh PDIP yang memiliki 24 kursi, jauh di atas kursi-kursi yang dimiliki oleh Golkar 12 kursi, PPP 12 kursi, PAN 5 kursi, PKB 3 kursi, PBB 2 kursi, PSII, PK, PNU, PDI, PP, PDR, PPII Masyumi, PKP, masing-masing 1 kursi.³³ Realitas politik ternyata tidak relevan dengan penguasaan jumlah kursi yang dimiliki partai politik. Melalui dominasi dan pengaruh kepemimpinannya jawara mampu menarik dukungan dari partai-partai lain, sehingga pasangan DM-At yang tidak diunggulkan dapat memenangkan pemilihan dengan meraih 37 suara, mengungguli pesaingnya AM-MC yang hanya didukung oleh suara bulat partainya, 24 suara.

Di golkar, kader-kader menempati posisi strategis dalam struktur partai, seperti bendahara partai, wakil ketua atau di departemen-departemen dan organisasi-organisasi massa di bawah golkar. Di legislatif, selain banyak yang menjadi anggota, juga mampu menembus Ketua Fraksi bahkan Ketua DPRD. Mobilitas horizontal jawara didukung oleh kekuatan dan penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi di Banten

Jawara menguasai institusi-institusi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan penguasaan terhadap institusi-institusi bisnis strategis ini, jawara dapat mengendalikan penguasaan terhadap kapital. Penguasaan terhadap kapital semakin memperkuat “otoritas tradisionalnya”, sebagai pemimpin, dan golongan sosial yang menduduki strata atas.

Dalam pandangan masyarakat Serang, sebagaimana dijelaskan Tihami,³⁴ tidak semua jawara dapat diakui sebagai pemimpin. Jawara dapat diakui sebagai pemimpin jika menduduki jabatan tertentu, seperti kepala desa, atau jawara yang memiliki kekayaan. Jawara yang kaya, seringkali dianggap sebagai pendukung dana pembangunan fisik di masyarakat, misalnya pembangunan mesjid dan jalan desa, atau pendukung santunan bagi warga desa yang miskin. Harapan masyarakat terhadap orang kaya memberi peluang bagi jawara-kaya itu untuk menjadi pihak yang menempati posisi sosial dengan strata atas dalam hirarki sosialnya.

Jawara dengan demikian, telah melakukan proses mobilitas secara sekaligus yang berkait dengan mobilitas intragenerasi dan mobilitas menyamping (horizontal). Mobilitas intragenerasi adalah proses perubahan status sosial kejawaraan seseorang dalam perjalanan hidupnya. Seperti perjalanan seorang jawara dari mulai kepala buruh, centeng, hingga mewadahi para jawara dalam organisasi kejawaraan. Sementara mobilitas horizontal berkait dengan proses perubahan menyamping di luar pengalaman hidup sebagai seorang jawara. Seperti mobilitas di bidang politik dan ekonomi. Kemampuan jawara dalam melakukan mobilitas tersebut telah menghantarkan jawara menjadi elite yang memiliki privilese dan prestise sosial yang bersumber dari kekuasaan sebagai dimensi utamanya.

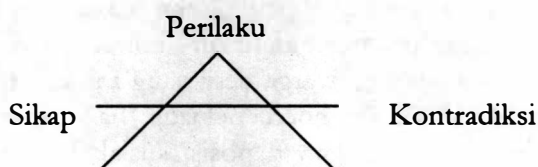
Kekerasan sebagai Strategi Mobilitas

Sebagaimana dijelaskan Smelser,³⁵ salah satu cara untuk merubah status sosial secara radikal dilakukan dengan cara kekerasan. Lebih dari sekedar budaya, kekerasan jawara selain untuk mempertahankan eksistensinya, dapat dianggap sebagai tindakan yang memiliki makna untuk mengolah mobilitas.³⁶

Istilah kekerasan³⁷ digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*convert*), dan baik yang bersifat meyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan terbuka seperti melakukan ancaman dan kekerasan *defensive* yang dilakukan untuk tindakan perlindungan diri jauh lebih menonjol.

Perilaku mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka jika diperlukan. Orang yang melakukan ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, tetapi orang percaya terhadap kebenaran ancaman dan kemampuan pengancam mewujudkan ancamannya. Kekerasan agresif

yang bersifat terbuka biasanya akan terwujud jika terjadi rasa frustrasi dari mengancam. Johan Galtung,³⁸ menjelaskan kekerasan agresif dalam skema segitiga konflik.



Melalui skema segitiga konflik tersebut Galtung menjelaskan bahwa suatu kontradiksi terjadi karena sebuah tujuan dihalangi yang mengakibatkan rasa frustrasi yang mendorong sikap agresif sebagai perilaku ancaman oleh karena itu dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan dan merupakan unsur penting kekuatan (*power*), sekaligus juga alat untuk mewujudkan keinginan sekalipun harus menghadapi dengan keinginan yang berlawanan.

Bentuk kekerasan yang bernada ancaman ini, menjadi strategi efektif bagi kekuasaan kultural jawara. Bagaimana kekuasaan itu dipertahankan, dalam pendekatan Gramsci³⁹ dilakukan dengan dua cara; pertama, dengan cara dominasi atau paksaan (*coercion*), dan kedua, dengan kepemimpinan intelektual dan moral. Cara yang kedua itulah yang kemudian disebut Gramsci sebagai praktek hegemoni.

Dalam peraktek dominasi, kekuasaan dibangun dengan cara-cara represif atau kekerasan. Suatu individu atau kelompok sosial di dalam masyarakat yang dapat menguasai atau memiliki akses terhadap instrument kekerasan, maka ia akan dengan mudah memperoleh kekuasaan. Sementara hegemoni, adalah sebuah rantai kemenangan yang dibangun melalui mekanisme konsensus. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa.⁴⁰ Gramsci membedakan hegemoni dari penggunaan paksaan yang digunakan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif atau yang diwujudkan melalui intervensi kebijakan. Melalui instrumen kekerasan (dominasi) dan mekanisme konsensus (hegemoni) kepemimpinan kultural jawara dibangun.

Pada tahun 1999, saat pemilihan Bupati Kabupaten Serang digelar misalnya, jawara melakukan kekerasan politik⁴¹ dengan mengancam akan mengganggu lancarnya proses pemilihan jika tata tertib pemilihan tidak mengakomodasi kepentingan mereka. Mereka tidak setuju dengan salah satu persyaratan calon bupati yaitu harus putra daerah atau orang yang sudah lama berdomisili di Serang paling kurang

selama 5 (lima) tahun. Persyaratan ini tentu saja menghambat salah satu calon jagoan mereka yang bukan putra daerah dan belum mencapai persyaratan domisili. Calon yang mereka usung adalah Plt. Bupati Serang yang menjabat kurang lebih selama 2 tahun.

Sidang penetapan tata tertib pemilihan memakan waktu yang cukup alot dan menegangkan yang berakhir pada pukul 24.00 dengan keputusan menghentikan proses pemilihan karena calon yang dijagokan jawara tidak bisa masuk bursa pencalonan. Akhirnya sidang pemilihan ditunda selama 1 x 24 jam, dan seluruh anggota dewan malam itu juga “diamankan” di salah satu hotel di Añyer – Serang. Suasana semakin menghawatirkan karena dua kekuatan jawara terbesar di Banten yang berada di bawah organisasi TTKDH dengan PPPSBBi saling berhadapan akibat perbedaan dukungan terhadap calon.

Seberapa besar tingkat ketegangan tersebut, dituturkan oleh RR:

Saya orang yang paling dicari oleh HS, karena saya yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap gagalnya bakal calon yang akan mereka usung. Saya diancam mau “*dikadek*”, karena mereka menganggap saya lah yang merekayasa aturan-aturan pemilihan. Tantangan mereka membangkitkan keberanian “menjaminkan” leher saya untuk tetap melangsungkan proses pemilihan. Dan setelah melakukan musyawarah di luar sidang yang cukup alot dan menegangkan itu akhirnya dapat ditemukan penyelesaian dan sidang dapat dilanjutkan.

Bahasa “*kadek*” biasa diidentikan dengan jawara di masyarakat banten. Ini menjadi simbol bahasa yang identik dengan identitas budaya “golok” sebagai senjata pelengkap seorang jawara. Pada masa perjuangan golok menjadi senjata tradisional yang digunakan jawara untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial.

Pada masyarakat Banten dikenal dua istilah dalam penyebutan golok, walaupun secara fisik keduanya sulit dibedakan, yakni “*bedog*” dan “golok”.⁴² Keduanya hanya dapat dibedakan menurut fungsinya. *Bedog* biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari baik di rumah tangga maupun untuk kepentingan berladang. Sementara golok, umumnya digunakan untuk kepentingan membela diri atau digunakan dalam keadaan darurat. Golok seperti senjata pistol bagi TNI atau polisi. Bagi seorang TNI atau polisi tidak bisa menggunakan senjatanya jika bukan dalam keadaan terpaksa.

Golok jawara bukan golok sembarangan. Biasanya mereka menggunakan golok Ciomas yang sudah terkenal dengan kekuatan “isinya”. Golok Ciomas diyakini memiliki kekuatan mistis yang sangat

“isinya”. Golok Ciomas diyakini memiliki kekuatan mistis yang sangat ampuh untuk menaklukkan musuh. Penaklukan ini tidak berarti si musuh harus dilukai secara fisik. Musuh dapat ditaklukan tanpa harus mengeluarkan golok dari “serangkanya”.⁴³ Sebuah perselisihan dapat diselesaikan oleh orang yang memiliki golok Ciomas tanpa harus menggunakan kekerasan dengan golok. Karena sifat mistisnya ini, mereka sangat hati-hati dalam menggunakan golok. Tentang kedudukan golok bagi jawara sebagaimana dijelaskan oleh HS;

Golok itu pulpenya orang sekolahan. Jadi kalau orang sekolahan yang disakunya pulpen, kalau jawara *mah* golok. Dengan bekal golok itu para jawara bisa mendapatkan penghasilan. Mereka menjadi kepala kuli dan tukang “panggul” di pasar-pasar di Jakarta. Misalnya, Mad Waluh, H. Kunder, H. Suraka dan lain-lainnya.

H. Kunder dan H. Suraka adalah dua orang tokoh jawara Banten yang cukup sukses menjadi penguasa keamanan pasar-pasar di hampir seluruh pasar Jakarta Selatan sejak tahun 1950-an hingga tahun 1980-an. Secara umum jawara tidak memiliki pendidikan formal yang cukup. Kelebihan dalam ilmu-ilmu kanuragan dan kemampuan dalam ilmu silat menjadi modal dalam kehidupan dua tokoh jawara tersebut. Untuk menunjukan eksistensinya biasanya segala identitas-identitas kejawaraan mereka digunakan, seperti golok dan pakaian. Simbol-simbol identitas tersebut dapat dipandang sebagai simbol solidaritas kelompok jawara. Sebagaimana penegasan Hobswan,⁴⁴ kaidah-kaidah berpakaian menjadi sarana dalam membentuk dan mereproduksi berbagai kelompok masyarakat, dalam pengertian bahwa ikatan yang terjalin diantara kelompok-kelompok ini menjadi terlihat jelas.

Selain “hitam-hitam”, simbol pakaian yang digunakan jawara adalah “putih-hitam”, dengan aksesoris yang persis sama berpeci, berselendang sarung, dan terselip golok di pinggangnya. Secara sederhana pada masyarakat banten, katagori sosial jawara diantaranya dapat dilihat dari simbol pakaian dan goloknya. Masyarakat akan menyebut seseorang itu jawara, jika ia menggunakan identitas pakaian yang di pinggangnya terselip golok.

Simbol identitas itu juga menjadi sarana untuk membangun jaringan sosialnya, baik antar jawara maupun masyarakat lainnya. Salah seorang tokoh jawara⁴⁵ ketika mengantar temannya ke R.S. Cicendo Bandung untuk dioperasi mata, bertemu dengan salah seorang dokter yang ternyata memiliki Golok Ciomas. Golok itu yang kemudian menghantarkan keduanya menjalin kekerabatan yang cukup intim dan

malah menawarkan untuk mengoperasi mata si tokoh jawara itu. Malahan si tokoh jawara itu yang paling pertama dioperasi dibanding teman yang diantarnya dengan tanpa membayar seperserpun.

Salah seorang tokoh nasional dan Menteri Perumahan Rakyat, Ir. Akbar Tanjung, pada tahun 1997 diberi hadiah golok dan pakaian serba hitam oleh HS, saat berkunjung ke Serang untuk meresmikan dimulainya pembangunan Pasar Rawu Serang. Simbol identitas budaya jawara itu kemudian dipakai Akbar Tanjung selama acara berlangsung. Pemberian simbol identitas itu juga pernah diberikan kepada artis Ratno Timur dan Jendral Prabowo Subijakto saat menjadi Danjen Kopasus. Keduanya diangkat menjadi anggota kehormatan Pendekar Banten. Selanjutnya Ratno Timur diangkat menjadi Ketua Pendekar Jakarta hingga akhir hayatnya. Atas dasar kedekatan ini yang menjadi alasan permintaan almarhum untuk dikuburkan di daerah Ciomas Serang.

Pemberian identitas ini, pada keadaan tertentu dimaknai untuk memberikan semangat dalam mewujudkan sikap keberanian dari si penerima hadiah. Seperti dalam kasus pemberian hadiah golok bagi perangkat hukum. Pada peristiwa demonstrasi penuntasan kasus dana perumahan yang menyeret empat orang pimpinan DPRD Banten periode 2000-2004, Ketua Kejaksaan Tinggi Banten dihiahi sebilah golok. Pemberian ini dimaksudkan agar Kejaksaan Tinggi Banten harus berani secara sungguh-sungguh untuk dapat menuntaskan tindakan-tindakan KKN yang terjadi di wilayah Banten.

Identitas budaya lain yang dimiliki jawara, adalah memiliki karakter agresif dan *sompral* (tutur kata yang keras) yang seringkali diungkapkan secara “blak-blakan” (apa adanya). Pilihan kata baik dalam bahasa pergaulannya maupun dalam keadaan khusus, disampaikan secara apa adanya tanpa ada “*tedeng aling-aling*” (basa-basi). Apa yang diucapkan sebagaimana apa yang ada dalam pikirannya. Inilah menurut Tihami⁴⁶ yang membedakan jawara dengan bukan jawara. Mereka tidak perlu berbasa-basi dalam berkata-kata untuk menyampaikan tujuannya. Tihami menggambarkan karakter jawara pada saat proses pembentukan Provinsi Banten.

Pada saat proses pembentukan Provinsi Banten, kami melakukan perjalanan ke beberapa kota yang menjadi bagian dari Jawa Barat untuk memohon dukungan sekaligus “pamitan”. Kami juga melakukan dialog-dialog dengan DPRD di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, DPR RI. Pada saat melakukan dialog di DPR RI Pak Haji Hasan menyampaikan tujuannya dengan bahasa kejawaraan “*pokoknya kami ingin Banten menjadi provinsi sekarang juga*”. Inilah karakter seorang jawara yang bahasanya begitu

terbuka. Sementara kami menggunakan bahasa dengan pilihan-pilihan kata yang sangat akademik dan argumentatif.

Ungkapan yang sama juga terlontar pada saat rombongan KADIN Provinsi Banten berkunjung ke Bank Indonesia (BI) untuk menyampaikan keinginan KADIN Banten mendorong berdirinya Bank Indonesia di daerah Banten.⁴⁷ dalam menutup dialognya salah seorang perwakilan menyampaikan kata-kata *"kami ingin Bank Indonesia Banten didirikan sekarang juga"*. KADIN Provinsi Banten dipimpin oleh HS yang anggotanya banyak terdapat kader-kader jawara.

Simbol-simbol identitas yang memberikan kesan "kekerasan" menjadi alat efektif dalam membangun kekuasaan-kekuasaan baik politik maupun ekonomi. Mereka biasanya menggunakan kata-kata *"sompral"* yang bernada ancaman untuk memperoleh tujuannya. Pada saat ini, nada-nada ancaman itu tidak saja disampaikan secara "blak-blakan" atau langsung, tetapi juga menggunakan sarana-sarana media, seperti melalui SMS atau tekanan melalui media masa koran.

Eksistensi jawara dengan segala identitas budayanya yang memberikan kesan keras, telah mewarisi perasaan takut bagi masyarakat. Tidak ada keberanian baik masyarakat maupun institusi pemerintah untuk melakukan protes, jika mereka tidak mau diancam. Ketidakmampuan institusi-institusi pemerintah dalam mengatasi kekerasan dan demi menjaga stabilitas kekuasaan dan keberlangsungan pembangunan, akhirnya terjadi konsensus-konsensus yang kemudian semakin memperluas kepemimpinan kultural jawara. Program-program pemerintah daerah tidak dapat berjalan efektif jika tidak melakukan konsensus dengan jawara. Malahan kekuasaannya melebihi kekuasaan pemerintah daerah. Mereka yang mengatur lalu lintas proyek-proyek pembangunan. Biasanya, sebelum tender proyek dilakukan, mereka mengundang pihak pemerintahan untuk menentukan kesepakatan kepada siapa proyek itu harus diturunkan.⁴⁸ Tender terbuka itu hanya sebatas formalitas saja. Untuk kelas-kelas proyek yang skalanya kecil penunjukan perusahaan A atau B-nya sudah ditentukan HS. Untuk skala yang besar itu pasti HS. Selain secara kelayakan administrasi cukup, pemerintah mendapat tekanan untuk tidak bisa membuat keputusan yang lain.

Fenomena kekuasaan informal yang melebihi kekuasaan *"state"* di masyarakat Banten dikenal dengan istilah "Gubernur Jenderal". Istilah gubernur jenderal menunjuk kepada kekuasaan kolonial Belanda di Banten. Ia adalah penguasa tunggal atas negeri jajahan yang mengatur roda pemerintahan dan menentukan besar kecilnya upeti yang harus dikeluarkan rakyat atas tanah-tanah yang mereka kelola. Dalam konteks

politik,⁴⁹ fenomena gubernur jenderal dapat dikaitkan dengan istilah *shadow state* yang niscaya dalam peraktek kapitalisme global. *Shadow state* adalah mekanisme kolaborasi politik antara pengusaha sebagai pemilik modal dengan pemerintah, dimana kekuasaan *shadow state* bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di Banten *shadow state* itu dikuasai oleh jawara yang hampir setiap tahunnya dapat mempengaruhi RAPD.

Sebagai kekuatan *shadow state*, jawara menempatkan orang-orangnya baik di institusi-institusi pemerintah maupun institusi-institusi politik, dari mulai partai politik hingga lembaga legislatif. Orang-orang yang ditempatkan ada yang murni kader jawara atau orang lain yang sudah dibawah pengaruh mereka. Penempatan ini tentu saja semakin memudahkan mekanisme konsensus yang mereka bangun.

Penutup

Sebuah kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekerasan jawara telah melahirkan generasi penakut pada masyarakat Banten. Kondisi seperti itu selain memiliki resistensi sosial yang cukup tinggi, juga menjadi kendala bagi tumbuhnya sistem sosial yang lebih terbuka dan sistem politik demokratis yang dipandang sebagai komponen yang harus ada dalam membangun proses *civil society*. Ada dua hal paling tidak yang dapat dilakukan; pertama, memperkuat otoritas *state* dan kedua, mendorong pertumbuhan dan penguatan lembaga kontrol independen yang berbasis kultur, perguruan tinggi dan pers. Negara perlu kuat untuk tidak mudah terperangkap dari kemungkinan-kemungkinan intervensi jawara dalam mempengaruhi produk-produk kebijakan. Pada sisi lain, lembaga kontrol, perguruan tinggi, dan pers berperan sebagai instrumen yang diharapkan dapat melakukan kontrol kritis sehingga mampu memberikan keseimbangan kekuasaan jawara.

Catatan dan Referensi:

¹ Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888, 1984*, hal. 75

² Bandingkan dengan Suhartono, *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa*, 1995, hal.4. dan James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Yayasan Obor, 2000, hal. 389, pemberontakan petani merupakan teriakan para petani atas “roti”, tanah, dan penghapusan pajak sebagai basis materi bagi kelangsungan hidup mereka.

³ Kartodirdjo, *op cit*, hal. 75

⁴ Dalam masyarakat agraris, tanah merupakan sumber produksi dan kekayaan utama. Prestise seseorang dukur oleh kepemilikan atas tanah. Dan secara tradisional kepemilikan atas tanah ini kemudian akan menentukan status sosial seseorang.

- ⁵ Kartodirdjo, *op cit*, hal. 77
- ⁶ Suharto, *op cit*, hal. 48
- ⁷ *Ibid*, hal 49
- ⁸ Kartodirdjo, *op cit*, hal. 110
- ⁹ Jonathan H. Turner, *The Struktur of Sosiological Theory*, 1991, hal. 67
- ¹⁰ *Ibid*, hal. 68
- ¹¹ Kartodirdjo, *op cit*, 113
- ¹² Schrieke, *Penguasa-penguasa Pribumi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1974, hal. 33
- ¹³ *Ibid*, hal. 140
- ¹⁴ *Ibid*.
- ¹⁵ Kartodirdjo, *op cit*, hal. 83.
- ¹⁶ *Ibid*, hal. 133
- ¹⁷ *Ibid*, hal, 126-127
- ¹⁸ *Ibid*, hal, 131
- ¹⁹ *Ibid*, hal. 130
- ²⁰ Jeffries and Ransford, *Social Stratification; a Multiple Hierarchy Approach*, Allyn and Bacon, Inc. 1980, hal. 64
- ²¹ Sanderson, *Makro Sosiologi*, Rajawali Pers, 2000, hal. 157
- ²² Jeffries and Ransford, *op cit*, hal.66
- ²³ *Ibid*, hal.14-15
- ²⁴ Lihat Lili Romli, dalam *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai; Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 115-116
- ²⁵ Zainuddin Djafar, *Soeharto; Mengapa Kekuasaannya dapat Bertahan 32 Tahun?*, FISIP UI Press, 2005, hal. 63
- ²⁶ Kurniawati Hastuti Dewi, dalam *Stakeholders dan Kebijakan Publik.....*, *op cit*, hal. 224
- ²⁷ Bandingkan dengan Hudaeri dkk, *Tasbih dan Golok; Kedudukan, Peran, dan Jaringan Kiyai dan Jawara di Banten*, hal. 133-135
- ²⁸ wawancara dengan HS. Menurut HS dalam melakukan hubungan baik bisnis maupun lainnya berdasarkan kepada doktrin keagamaan yang disebut dengan mu'amalah. Dalam bermu'amalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjalin hubungan dengan siapapun tanpa mengenal batas. Oleh karena doktrin ini, HS dapat dikenal luas oleh semua kalangan, tidak saja ditingkat local atau nasional, tetapi ia juga dapat dikenal di luar negeri, seperti Jepang dan Korea, malahan di tingkat ASEAN sekalipun.
- ²⁹ BPS Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2001*, hal. 66
- ³⁰ Kurniawati Hastuti Dewi, *op cit*, hal. 239
- ³¹ Ramlan Surbakti, *Perbandingan Sistem Politik*, Mecphiso Grafika, Surabaya, 1984, hal. 63
- ³² Wawancara dengan AH salah seorang tim sukses At
- ³³ BPS Provinsi Banten, *op cit*, hal. 18-19
- ³⁴ Tihami, *op cit*, hal. 100-102
- ³⁵ Smelser, *Struktur Sosial dan Mobilitas dalam Pembangunan Ekonomi*, terj. tt. hal 21
- ³⁶ Lihat juga Crumney, *Banditry, Rebellion and Social Protest in Africa*, 1975, hal. 5-9

-
- ³⁷ Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11
- ³⁸ Johan Galtung, Studi Perdamaian; *Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, terj. Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hal. 161
- ³⁹ Antonio Gramsci, *Selections From the Prison Notebook*, Quintin dan Nowell Smith (ed.), Internastional Publisher, New York, 1976, hal. 57-58
- ⁴⁰ George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, Mc Graw-Hill Companies, Singapore, 1996, hal. 145
- ⁴¹ yang dimaksud kekerasan politik adalah penggunaan kekerasan fisik atau pemaksaan yang dilancarkan dengan maksud merusak pihak lain dan berkaitan dengan perjuangan untuk merebut kekuasaan. Lihat Henk Schulte Nordholt, *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, op cit. hal. 2
- ⁴² Oman Solihin dan Akhmad Supriyatna, *Golok Ciomas; Hikayat & Keistimewaanannya*, Spora Pustaka, 2003, hal. 4
- ⁴³ *Ibid*, hal. 5
- ⁴⁴ *Outward Appearanes; Trend, Identitas, Kepentingan*, LKiS, 2005, hal. 2
- ⁴⁵ Oman Solihin dan Akhmad Supriyatna, op cit, hal. 7
- ⁴⁶ Tihami, dalam Seminar *Peran Jawara dalam Transisi Kekuasaan di Banten*
- ⁴⁷ Kunjungan itu dilaksanakan pada tanggal 25 April 2005 dan penulis turut menjadi peserta mewakili salah satu unsur dari Perguruan Tinggi.
- ⁴⁸ Wawancara dengan CC, salah seorang pegawai di Dinas PU Provinsi Banten yang bertugas sebagai pengawas proyek-proyek pemerintah daerah. Wawancara ini dilakukan di tempat HS, saat CC dipanggil HS ke kantornya. HS adalah pelaksana proyek yang sedang diawasi CC
- ⁴⁹ Gandung Ismanto, dalam *Publik*, Edisi 4, hal. 10.

H.S. Suhaedi, adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang.